



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 208 /PMK.07/2008

TENTANG

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM  
PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2009

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tatacara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Kas Umum Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

- Memperhatikan:
1. Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 beserta Nota Keuangannya tanggal 16 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2008;
  2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2498 K/80/MEM/2008 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum untuk masing-masing Daerah Tahun Anggaran 2009 adalah merupakan perkiraan.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari penerimaan Iuran Tetap dan Royalty.

Pasal 2

- (1) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun berdasarkan perkiraan penerimaan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
- (2) Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar Rp6.978.760.999.677,00 (enam triliun sembilan ratus tujuh puluh

delapan miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Iuran Tetap sebesar Rp67.545.999.879,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
  - b. Royalty sebesar Rp6.911.214.999.798,00 (enam triliun sembilan ratus sebelas miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

### Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dilaksanakan secara triwulanan.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Triwulan I dan Triwulan II masing-masing dilaksanakan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu, perkiraan alokasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diperhitungkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Triwulan III dan Triwulan IV.
- (4) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perhitungan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dengan daerah penghasil.
- (5) Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 2008

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran.....



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 208/PMK.07/2008 TENTANG  
PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI  
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA  
ALAM PERTAMBANGAN UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2009

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL  
SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2009

( dalam rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>NANGGROE ACEH DARUSSALAM</b>	<b>906.324.212,00</b>	-	<b>906.324.212,00</b>
1	Kab. Aceh Barat	73.220.947,00	-	73.220.947,00
2	Kab. Aceh Besar	11.839.290,00	-	11.839.290,00
3	Kab. Aceh Selatan	15.871.907,00	-	15.871.907,00
4	Kab. Aceh Singkil	14.674.858,00	-	14.674.858,00
5	Kab. Aceh Tengah	451.044.529,00	-	451.044.529,00
6	Kab. Aceh Tenggara	-	-	-
7	Kab. Aceh Timur	25.599.850,00	-	25.599.850,00
8	Kab. Aceh Utara	-	-	-
9	Kab. Bireun	-	-	-
10	Kab. Aceh Pidie	66.404.091,00	-	66.404.091,00
11	Kab. Simeulue	-	-	-
12	Kota Banda Aceh	-	-	-
13	Kota Sabang	-	-	-
14	Kota Langsa	-	-	-
15	Kota Lhokseumawe	-	-	-
16	Kab. Nagan Raya	31.775.814,00	-	31.775.814,00
17	Kab. Aceh Jaya	7.250.261,00	-	7.250.261,00
18	Kab. Aceh Barat Daya	15.108.775,00	-	15.108.775,00
19	Kab. Gayo Lues	-	-	-
20	Kab. Aceh Tamiang	11.898.810,00	-	11.898.810,00
21	Kab. Bener Meriah	-	-	-
22	Kab. Pidie Jaya	-	-	-
23	Kota Subulussalam	370.237,00	-	370.237,00
	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	181.264.843,00	-	181.264.843,00
	<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>1.289.414.770,00</b>	-	<b>1.289.414.770,00</b>
1	Kab. Asahan	-	-	-
2	Kab. Dairi	78.983.601,00	-	78.983.601,00
3	Kab. Deli Serdang	-	-	-
4	Kab. Tanah Karo	-	-	-
5	Kab. Labuhan Batu	-	-	-
6	Kab. Langkat	-	-	-
7	Kab. Mandailing Natal	292.984.461,00	-	292.984.461,00
8	Kab. Nias	5.257.569,00	-	5.257.569,00
9	Kab. Simalungun	-	-	-
10	Kab. Tapanuli Selatan	328.811.580,00	-	328.811.580,00
11	Kab. Tapanuli Tengah	158.159.714,00	-	158.159.714,00
12	Kab. Tapanuli Utara	71.469.661,00	-	71.469.661,00
13	Kab. Toba Samosir	-	-	-
14	Kota Binjai	-	-	-
15	Kota Medan	-	-	-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Kota Pematang Siantar	-	-	-
17	Kota Sibolga	-	-	-
18	Kota Tanjung Balai	-	-	-
19	Kota Tebing Tinggi	-	-	-
20	Kota Padang Sidempuan	59.708.450,00	-	59.708.450,00
21	Kab. Pakpak Bharat	21.745.664,00	-	21.745.664,00
22	Kab. Nias Selatan	-	-	-
23	Kab. Humbang Hasundutan	14.411.115,00	-	14.411.115,00
24	Kab. Serdang Berdagai	-	-	-
25	Kab. Samosir	-	-	-
26	Kab. Batu Bara	-	-	-
27	Kab. Padang Lawas Utara	-	-	-
28	Kab. Padang Lawas	-	-	-
29	Kab. Labuhan Batu Selatan	-	-	-
30	Kab. Labuhan Batu Utara	-	-	-
	Prov. Sumatera Utara	257.882.955,00	-	257.882.955,00
	<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>584.844.265,00</b>	<b>15.404.338.227,00</b>	<b>15.989.182.492,00</b>
1	Kab. Limapuluh Kota	11.248.318,00	342.318.627,00	353.566.945,00
2	Kab. Agam	4.104.935,00	342.318.627,00	346.423.562,00
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	342.318.627,00	342.318.627,00
4	Kab. Padang Pariaman	-	342.318.627,00	342.318.627,00
5	Kab. Pasaman	75.853.764,00	342.318.627,00	418.172.391,00
6	Kab. Pesisir Selatan	27.719.837,00	342.318.627,00	370.038.464,00
7	Kab. Sawahlunto Sijunjung	57.612.574,00	583.537.971,00	641.150.545,00
8	Kab. Solok	23.866.407,00	342.318.627,00	366.185.034,00
9	Kab. Tanah Datar	-	342.318.627,00	342.318.627,00
10	Kota Bukit Tinggi	-	342.318.627,00	342.318.627,00
11	Kota Padang Panjang	-	342.318.627,00	342.318.627,00
12	Kota Padang	-	342.318.627,00	342.318.627,00
13	Kota Payakumbuh	-	342.318.627,00	342.318.627,00
14	Kota Sawahlunto	247.171.353,00	5.920.515.950,00	6.167.687.303,00
15	Kota Solok	-	342.318.627,00	342.318.627,00
16	Kota Pariaman	-	342.318.627,00	342.318.627,00
17	Kab. Pasaman Barat	-	342.318.627,00	342.318.627,00
18	Kab. Dharmasraya	5.975.107,00	342.318.627,00	348.293.734,00
19	Kab. Solok Selatan	14.323.116,00	342.318.627,00	356.641.743,00
	Prov. Sumatera Barat	116.968.854,00	3.080.867.647,00	3.197.836.501,00
	<b>RIAU</b>	<b>1.661.393.395,00</b>	<b>30.406.407.734,00</b>	<b>32.067.801.129,00</b>
1	Kab. Bengkalis	54.810.559,00	1.216.256.309,00	1.271.066.868,00
2	Kab. Indragiri Hilir	215.288.340,00	1.216.256.309,00	1.431.544.649,00
3	Kab. Indragiri Hulu	677.736.514,00	10.019.045.440,00	10.696.781.954,00
4	Kab. Kampar	176.567.926,00	1.216.256.309,00	1.392.824.235,00
5	Kab. Kuantan Singingi	145.991.721,00	3.083.932.551,00	3.229.924.272,00
6	Kab. Pelalawan	37.583.780,00	1.216.256.309,00	1.253.840.089,00
7	Kab. Rokan Hilir	-	1.216.256.309,00	1.216.256.309,00
8	Kab. Rokan Hulu	5.119.970,00	1.216.256.309,00	1.221.376.279,00
9	Kab. Siak	16.015.906,00	1.492.097.723,00	1.508.113.629,00
10	Kota Dumai	-	1.216.256.309,00	1.216.256.309,00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Kota Pekanbaru	-	1.216.256.309,00	1.216.256.309,00
	Prov. Riau	332.278.679,00	6.081.281.548,00	6.413.560.227,00
	<b>KEPULAUAN RIAU</b>	<b>1.258.404.722,00</b>	<b>147.464.213.436,00</b>	<b>148.722.618.158,00</b>
1	Kab. Bintan	234.732.066,00	31.019.181.523,00	31.253.913.589,00
2	Kab. Natuna	799.995,00	10.199.380.337,00	10.200.180.332,00
3	Kab. Karimun	274.005.724,00	17.608.478.595,00	17.882.484.319,00
4	Kota Batam	-	10.199.380.337,00	10.199.380.337,00
5	Kota Tanjung Pinang	34.882.778,00	25.954.905.559,00	25.989.788.337,00
6	Kab. Lingga	98.015.426,00	11.243.246.405,00	11.341.261.831,00
7	Kab. Anambas	-	10.199.380.337,00	10.199.380.337,00
	Bagian Provinsi	615.968.733,00	31.040.260.343,00	31.656.229.076,00
	<b>JAMBI</b>	<b>817.234.975,00</b>	<b>17.187.410.334,00</b>	<b>18.004.645.309,00</b>
1	Kab. Batanghari	177.323.442,00	1.606.967.794,00	1.784.291.236,00
2	Kab. Bungo	84.066.836,00	5.725.624.910,00	5.809.691.746,00
3	Kab. Kerinci	-	687.496.413,00	687.496.413,00
4	Kab. Merangin	154.213.497,00	687.496.413,00	841.709.910,00
5	Kab. Muaro Jambi	33.321.789,00	687.496.413,00	720.818.202,00
6	Kab. Sarolangun	140.742.472,00	917.364.258,00	1.058.106.730,00
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	36.680.105,00	687.496.413,00	724.176.518,00
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	687.496.413,00	687.496.413,00
9	Kab. Tebo	27.439.839,00	687.496.413,00	714.936.252,00
10	Kota Jambi	-	687.496.413,00	687.496.413,00
11	Kota Sungai Penuh	-	687.496.413,00	687.496.413,00
	Prov. Jambi	163.446.995,00	3.437.482.068,00	3.600.929.063,00
	<b>SUMATERA SELATAN</b>	<b>4.743.943.127,00</b>	<b>322.852.581.146,00</b>	<b>327.596.524.273,00</b>
1	Kab. Lahat	365.740.740,00	44.058.003.658,00	44.423.744.398,00
2	Kab. Musi Banyuasin	1.303.407.547,00	9.224.359.461,00	10.527.767.008,00
3	Kab. Musi Rawas	301.328.989,00	9.224.359.461,00	9.525.688.450,00
4	Kab. Muara Enim	1.195.865.707,00	94.307.388.265,00	95.503.253.972,00
5	Kab. Ogan Komering Ilir	-	9.224.359.461,00	9.224.359.461,00
6	Kab. Ogan Komering Ulu	201.634.340,00	9.224.359.461,00	9.425.993.801,00
7	Kota Palembang	-	9.224.359.461,00	9.224.359.461,00
8	Kota Pagar Alam	-	9.224.359.461,00	9.224.359.461,00
9	Kota Lubuk Linggau	-	9.224.359.461,00	9.224.359.461,00
10	Kota Prabumulih	16.979.100,00	9.224.359.461,00	9.241.338.561,00
11	Kab. Banyuasin	344.841.982,00	9.224.359.461,00	9.569.201.443,00
12	Kab. Ogan Ilir	-	9.224.359.461,00	9.224.359.461,00
13	Kab. OKU Timur	42.917.828,00	9.224.359.461,00	9.267.277.289,00
14	Kab. OKU Selatan	22.438.268,00	9.224.359.461,00	9.246.797.729,00
15	Kab. Empat Lawang	-	9.224.359.461,00	9.224.359.461,00
	Prov. Sumatera Selatan	948.788.626,00	64.570.516.230,00	65.519.304.856,00
	<b>BANGKA BELITUNG</b>	<b>9.901.015.386,00</b>	<b>317.907.229.869,00</b>	<b>327.808.245.255,00</b>
1	Kab. Bangka	2.290.099.669,00	52.984.112.631,00	55.274.212.300,00
2	Kab. Belitung	317.336.223,00	29.446.709.488,00	29.764.045.711,00
3	Kota Pangkal Pinang	76.767.550,00	21.193.815.324,00	21.270.582.874,00
4	Kab. Bangka Selatan	1.598.816.885,00	46.804.179.465,00	48.402.996.350,00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Kab. Bangka Tengah	1.195.149.634,00	32.572.805.762,00	33.767.955.396,00
6	Kab. Bangka Barat	1.394.367.841,00	41.189.710.557,00	42.584.078.398,00
7	Kab. Belitung Timur	1.048.274.506,00	30.134.450.668,00	31.182.725.174,00
	Prov. Bangka Belitung	1.980.203.078,00	63.581.445.974,00	65.561.649.052,00
	<b>BENGKULU</b>	<b>706.698.125,00</b>	<b>8.620.044.190,00</b>	<b>9.326.742.315,00</b>
1	Kab. Bengkulu Selatan	11.997.587,00	383.113.075,00	395.110.662,00
2	Kab. Bengkulu Utara	365.580.421,00	2.085.837.854,00	2.451.418.275,00
3	Kab. Rejang Lebong	-	383.113.075,00	383.113.075,00
4	Kota Bengkulu	-	383.113.075,00	383.113.075,00
5	Kab. Kaur	7.220.450,00	383.113.075,00	390.333.525,00
6	Kab. Seluma	117.576.412,00	1.745.292.898,00	1.862.869.310,00
7	Kab. Mukomuko	43.822.143,00	383.113.075,00	426.935.218,00
8	Kab. Lebong	15.833.507,00	383.113.075,00	398.946.582,00
9	Kab. Kepahiang	3.327.980,00	383.113.075,00	386.441.055,00
10	Kab. Bengkulu Tengah	-	383.113.075,00	383.113.075,00
	Prov. Bengkulu	141.339.625,00	1.724.008.838,00	1.865.348.463,00
	<b>LAMPUNG</b>	<b>334.839.718,00</b>	<b>62.854.482,00</b>	<b>397.694.200,00</b>
1	Kab. Lampung Barat	26.349.925,00	2.514.179,00	28.864.104,00
2	Kab. Lampung Selatan	11.742.331,00	18.676.762,00	30.419.093,00
3	Kab. Lampung Tengah	-	2.514.179,00	2.514.179,00
4	Kab. Lampung Utara	-	2.514.179,00	2.514.179,00
5	Kab. Lampung Timur	-	2.514.179,00	2.514.179,00
6	Kab. Tanggamus	226.053.461,00	8.979.212,00	235.032.673,00
7	Kab. Tulang Bawang	-	2.514.179,00	2.514.179,00
8	Kab. Way Kanan	3.092.461,00	2.514.179,00	5.606.640,00
9	Kota Bandar Lampung	-	2.514.179,00	2.514.179,00
10	Kota Metro	-	2.514.179,00	2.514.179,00
11	Kab. Pasawaran	633.596,00	2.514.179,00	3.147.775,00
	Bagian Provinsi	66.967.944,00	12.570.897,00	79.538.841,00
	<b>DKI JAKARTA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>455.879.170,00</b>	<b>20.827.570.949,00</b>	<b>21.283.450.119,00</b>
1	Kab. Bandung	-	333.241.135,00	333.241.135,00
2	Kab. Bekasi	-	333.241.135,00	333.241.135,00
3	Kab. Bogor	195.805.971,00	8.330.062.938,00	8.525.868.909,00
4	Kab. Ciamis	-	333.241.135,00	333.241.135,00
5	Kab. Cianjur	39.299.610,00	333.241.135,00	372.540.745,00
6	Kab. Cirebon	-	333.241.135,00	333.241.135,00
7	Kab. Garut	26.874.210,00	333.241.135,00	360.115.345,00
8	Kab. Indramayu	-	333.241.135,00	333.241.135,00
9	Kab. Karawang	-	333.241.135,00	333.241.135,00
10	Kab. Kuningan	-	333.241.135,00	333.241.135,00
11	Kab. Majalengka	-	333.241.135,00	333.241.135,00
12	Kab. Purwakarta	1.631.990,00	333.654.897,00	335.286.887,00
13	Kab. Subang	-	333.241.135,00	333.241.135,00
14	Kab. Sukabumi	77.799.167,00	333.792.818,00	411.591.985,00
15	Kab. Sumedang	-	333.241.135,00	333.241.135,00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Kab. Tasikmalaya	4.530.053,00	333.241.135,00	337.771.188,00
17	Kota Bandung	-	333.241.135,00	333.241.135,00
18	Kota Bekasi	-	333.241.135,00	333.241.135,00
19	Kota Bogor	-	333.241.135,00	333.241.135,00
20	Kota Cirebon	-	333.241.135,00	333.241.135,00
21	Kota Depok	-	333.241.135,00	333.241.135,00
22	Kota Sukabumi	-	333.241.135,00	333.241.135,00
23	Kota Cimahi	-	333.241.135,00	333.241.135,00
24	Kota Tasikmalaya	-	333.241.135,00	333.241.135,00
25	Kota Banjar	-	333.241.135,00	333.241.135,00
26	Kab. Bandung Barat	18.762.335,00	333.241.135,00	352.003.470,00
	Prov. Jawa Barat	91.175.834,00	4.165.514.191,00	4.256.690.025,00
	<b>BANTEN</b>	<b>112.386.476,00</b>	<b>527.616.139,00</b>	<b>640.002.616,00</b>
1	Kab. Lebak	88.193.992,00	211.046.457,00	299.240.449,00
2	Kab. Pandeglang	1.715.189,00	35.174.409,00	36.889.598,00
3	Kab. Serang	-	35.174.409,00	35.174.409,00
4	Kab. Tangerang	-	35.174.409,00	35.174.409,00
5	Kota Cilegon	-	35.174.409,00	35.174.409,00
6	Kota Tangerang	-	35.174.409,00	35.174.409,00
7	Kota Serang	-	35.174.409,00	35.174.409,00
	Prov. Banten	22.477.295,00	105.523.228,00	128.000.523,00
	<b>JAWA TENGAH</b>	<b>64.680.820,00</b>	<b>309.483.506,00</b>	<b>374.164.326,00</b>
1	Kab. Banjarnegara	-	3.640.982,00	3.640.982,00
2	Kab. Banyumas	-	3.640.982,00	3.640.982,00
3	Kab. Batang	-	3.640.982,00	3.640.982,00
4	Kab. Blora	-	3.640.982,00	3.640.982,00
5	Kab. Boyolali	-	3.640.982,00	3.640.982,00
6	Kab. Brebes	-	3.640.982,00	3.640.982,00
7	Kab. Cilacap	4.101.096,00	47.332.775,00	51.433.871,00
8	Kab. Demak	-	3.640.982,00	3.640.982,00
9	Kab. Grobogan	-	3.640.982,00	3.640.982,00
10	Kab. Jepara	-	3.640.982,00	3.640.982,00
11	Kab. Karanganyar	-	3.640.982,00	3.640.982,00
12	Kab. Kebumen	-	3.640.982,00	3.640.982,00
13	Kab. Kendal	-	3.640.982,00	3.640.982,00
14	Kab. Klaten	-	3.640.982,00	3.640.982,00
15	Kab. Kudus	-	3.640.982,00	3.640.982,00
16	Kab. Magelang	-	3.640.982,00	3.640.982,00
17	Kab. Pati	-	3.640.982,00	3.640.982,00
18	Kab. Pekalongan	7.190.997,00	3.640.982,00	10.831.979,00
19	Kab. Pemasang	-	3.640.982,00	3.640.982,00
20	Kab. Purbalingga	-	3.640.982,00	3.640.982,00
21	Kab. Purworejo	36.356.587,00	80.101.619,00	116.458.206,00
22	Kab. Rembang	-	3.640.982,00	3.640.982,00
23	Kab. Semarang	-	3.640.982,00	3.640.982,00
24	Kab. Sragen	-	3.640.982,00	3.640.982,00
25	Kab. Sukoharjo	-	3.640.982,00	3.640.982,00
26	Kab. Tegal	-	3.640.982,00	3.640.982,00





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	Kab. Temanggung	-	3.640.982,00	3.640.982,00
28	Kab. Wonogiri	4.095.976,00	3.640.982,00	7.736.958,00
29	Kab. Wonosobo	-	3.640.982,00	3.640.982,00
30	Kota Magelang	-	3.640.982,00	3.640.982,00
31	Kota Pekalongan	-	3.640.982,00	3.640.982,00
32	Kota Salatiga	-	3.640.982,00	3.640.982,00
33	Kota Semarang	-	3.640.982,00	3.640.982,00
34	Kota Surakarta	-	3.640.982,00	3.640.982,00
35	Kota Tegal	-	3.640.982,00	3.640.982,00
	Prov. Jawa Tengah	12.936.164,00	61.896.706,00	74.832.870,00
	<b>D.I. YOGYAKARTA</b>	<b>35.266.688,00</b>	<b>-</b>	<b>35.266.688,00</b>
1	Kab. Bantul	-	-	-
2	Kab. Gunung Kidul	-	-	-
3	Kab. Kulon Progo	28.213.351,00	-	28.213.351,00
4	Kab. Sleman	-	-	-
5	Kota Yogyakarta	-	-	-
	Prov. D.I. Yogyakarta	7.053.337,00	-	7.053.337,00
	<b>JAWA TIMUR</b>	<b>265.394.962,00</b>	<b>564.972.058,00</b>	<b>830.367.020,00</b>
1	Kab. Bangkalan	-	6.107.806,00	6.107.806,00
2	Kab. Banyuwangi	427.517,00	27.308.455,00	27.735.972,00
3	Kab. Blitar	-	6.107.806,00	6.107.806,00
4	Kab. Bojonegoro	-	6.107.806,00	6.107.806,00
5	Kab. Bondowoso	-	6.107.806,00	6.107.806,00
6	Kab. Gresik	-	6.107.806,00	6.107.806,00
7	Kab. Jember	57.870.957,00	6.107.806,00	63.978.763,00
8	Kab. Jombang	16.321.024,00	152.881.531,00	169.202.555,00
9	Kab. Kediri	-	6.107.806,00	6.107.806,00
10	Kab. Lamongan	-	6.107.806,00	6.107.806,00
11	Kab. Lumajang	8.070.352,00	6.107.806,00	14.178.158,00
12	Kab. Madiun	13.917.998,00	6.107.806,00	20.025.804,00
13	Kab. Magetan	-	6.107.806,00	6.107.806,00
14	Kab. Malang	-	6.107.806,00	6.107.806,00
15	Kab. Mojokerto	-	6.107.806,00	6.107.806,00
16	Kab. Nganjuk	-	6.107.806,00	6.107.806,00
17	Kab. Ngawi	-	6.107.806,00	6.107.806,00
18	Kab. Pacitan	18.739.090,00	6.107.806,00	24.846.896,00
19	Kab. Pamekasan	-	6.107.806,00	6.107.806,00
20	Kab. Pasuruan	23.436.022,00	48.509.104,00	71.945.126,00
21	Kab. Ponorogo	12.566.966,00	6.107.806,00	18.674.772,00
22	Kab. Probolinggo	-	6.107.806,00	6.107.806,00
23	Kab. Sampang	-	6.107.806,00	6.107.806,00
24	Kab. Sidoarjo	-	6.107.806,00	6.107.806,00
25	Kab. Situbondo	-	6.107.806,00	6.107.806,00
26	Kab. Sumenep	-	6.107.806,00	6.107.806,00
27	Kab. Trenggalek	60.966.043,00	15.613.152,00	76.579.195,00
28	Kab. Tuban	-	6.107.806,00	6.107.806,00
29	Kab. Tulungagung	-	6.107.806,00	6.107.806,00
30	Kota Blitar	-	6.107.806,00	6.107.806,00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	Kota Kediri	-	6.107.806,00	6.107.806,00
32	Kota Madiun	-	6.107.806,00	6.107.806,00
33	Kota Malang	-	6.107.806,00	6.107.806,00
34	Kota Mojokerto	-	6.107.806,00	6.107.806,00
35	Kota Pasuruan	-	6.107.806,00	6.107.806,00
36	Kota Probolinggo	-	6.107.806,00	6.107.806,00
37	Kota Surabaya	-	6.107.806,00	6.107.806,00
38	Kota Batu	-	6.107.806,00	6.107.806,00
	Prov. Jawa Timur	53.078.993,00	112.994.412,00	166.073.405,00
	<b>KALIMANTAN BARAT</b>	<b>3.319.973.611,00</b>	<b>106.393.693.612,00</b>	<b>109.713.667.223,00</b>
1	Kab. Bengkayang	43.825.119,00	3.273.652.111,00	3.317.477.230,00
2	Kab. Landak	75.181.640,00	3.273.652.111,00	3.348.833.751,00
3	Kab. Kapuas Hulu	628.191.204,00	3.373.114.159,00	4.001.305.363,00
4	Kab. Ketapang	1.095.740.789,00	40.571.920.258,00	41.667.661.047,00
5	Kab. Pontianak	3.839.977,00	3.273.652.111,00	3.277.492.088,00
6	Kab. Sambas	46.771.086,00	3.273.652.111,00	3.320.423.197,00
7	Kab. Sanggau	365.914.915,00	5.159.747.251,00	5.525.662.166,00
8	Kab. Sintang	186.194.110,00	3.273.652.111,00	3.459.846.221,00
9	Kota Pontianak	-	3.273.652.111,00	3.273.652.111,00
10	Kota Singkawang	-	3.273.652.111,00	3.273.652.111,00
11	Kab. Sekadau	46.245.489,00	3.273.652.111,00	3.319.897.600,00
12	Kab. Melawi	98.239.425,00	3.273.652.111,00	3.371.891.536,00
13	Kab. Kayong Utara	-	3.273.652.111,00	3.273.652.111,00
14	Kab. Kubu Raya	65.835.134,00	3.273.652.111,00	3.339.487.245,00
	Prov. Kalimantan Barat	663.994.723,00	21.278.738.723,00	21.942.733.446,00
	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>6.207.374.781,00</b>	<b>100.879.020.334,00</b>	<b>107.086.395.115,00</b>
1	Kab. Barito Selatan	377.462.930,00	4.518.541.211,00	4.896.004.141,00
2	Kab. Barito Utara	904.817.362,00	6.286.755.405,00	7.191.572.767,00
3	Kab. Kapuas	184.709.581,00	3.103.969.856,00	3.288.679.437,00
4	Kab. Kotawaringin Barat	32.325.378,00	4.297.514.437,00	4.329.839.815,00
5	Kab. Kotawaringin Timur	86.467.398,00	6.246.970.585,00	6.333.437.983,00
6	Kota Palangkaraya	21.175.940,00	3.369.201.985,00	3.390.377.925,00
7	Kab. Barito Timur	302.228.183,00	4.990.064.996,00	5.292.293.179,00
8	Kab. Murung Raya	2.385.300.476,00	29.186.809.016,00	31.572.109.492,00
9	Kab. Pulang Pisau	-	3.103.969.856,00	3.103.969.856,00
10	Kab. Gunung Mas	298.566.822,00	3.103.969.856,00	3.402.536.678,00
11	Kab. Lamandau	59.752.610,00	3.103.969.856,00	3.163.722.466,00
12	Kab. Sukamara	-	3.103.969.856,00	3.103.969.856,00
13	Kab. Katingan	236.530.904,00	3.183.539.495,00	3.420.070.399,00
14	Kab. Seruyan	76.562.240,00	3.103.969.856,00	3.180.532.096,00
	Prov. Kalimantan Tengah	1.241.474.957,00	20.175.804.068,00	21.417.279.025,00
	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>7.556.107.567,00</b>	<b>1.195.481.239.335,00</b>	<b>1.203.037.346.902,00</b>
1	Kab. Banjar	618.194.674,00	84.909.474.403,00	85.527.669.077,00
2	Kab. Barito Kuala	-	39.849.374.644,00	39.849.374.644,00
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	280.620.918,00	48.094.308.569,00	48.374.929.487,00
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	80.926.758,00	39.849.374.644,00	39.930.301.402,00
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	39.849.374.644,00	39.849.374.644,00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Kab. Kota Baru	1.790.051.600,00	134.091.221.688,00	135.881.273.288,00
7	Kab. Tabalong	500.204.017,00	128.818.426.579,00	129.318.630.596,00
8	Kab. Tanah Laut	737.311.769,00	69.069.068.352,00	69.806.380.121,00
9	Kab. Tapin	371.161.732,00	57.750.217.685,00	58.121.379.417,00
10	Kota Banjar Baru	173.271.818,00	41.499.953.477,00	41.673.225.295,00
11	Kota Banjarmasin	-	39.849.374.644,00	39.849.374.644,00
12	Kab. Balangan	351.767.539,00	123.521.317.670,00	123.873.085.209,00
13	Kab. Tanah Bumbu	1.141.375.228,00	109.233.504.468,00	110.374.879.696,00
	Prov. Kalimantan Selatan	1.511.221.514,00	239.096.247.868,00	240.607.469.382,00
	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>10.999.832.078,00</b>	<b>2.882.392.626.303,00</b>	<b>2.893.392.358.381,00</b>
1	Kab. Berau	802.959.046,00	176.185.838.455,00	176.988.797.501,00
2	Kab. Bulungan	341.751.408,00	88.689.000.809,00	89.030.752.217,00
3	Kab. Kutai Kartanegara	3.078.055.066,00	271.056.217.700,00	274.134.272.766,00
4	Kab. Kutai Barat	1.472.093.915,00	183.706.937.528,00	185.179.031.443,00
5	Kab. Kutai Timur	1.561.337.085,00	600.289.949.883,00	601.851.286.968,00
6	Kab. Malinau	58.993.254,00	90.351.122.151,00	90.410.115.405,00
7	Kab. Nunukan	295.045.313,00	126.960.523.519,00	127.255.568.832,00
8	Kab. Paser	583.640.336,00	207.335.289.095,00	207.918.929.431,00
9	Kota Balikpapan	-	88.689.000.809,00	88.689.000.809,00
10	Kota Bontang	18.655.506,00	88.689.000.809,00	88.707.656.315,00
11	Kota Samarinda	268.783.829,00	116.008.042.717,00	116.276.826.546,00
12	Kota Tarakan	-	88.689.000.809,00	88.689.000.809,00
13	Kab. Penajam Paser Utara	318.550.904,00	90.575.095.949,00	90.893.646.853,00
14	Kab. Tana Tidung	-	88.689.000.809,00	88.689.000.809,00
	Prov. Kalimantan Timur	2.199.966.416,00	576.478.505.261,00	578.678.471.677,00
	<b>SULAWESI UTARA</b>	<b>1.435.251.087,00</b>	<b>1.606.538.376,00</b>	<b>3.041.789.463,00</b>
1	Kab. Bolaang Mongondow	1.052.733.040,00	642.615.355,00	1.695.348.395,00
2	Kab. Minahasa	-	45.901.096,00	45.901.096,00
3	Kab. Sangihe	-	45.901.096,00	45.901.096,00
4	Kota Bitung	6.677.871,00	45.901.096,00	52.578.967,00
5	Kota Manado	192.510,00	45.901.096,00	46.093.606,00
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	45.901.096,00	45.901.096,00
7	Kab. Minahasa Selatan	-	45.901.096,00	45.901.096,00
8	Kota Tomohon	-	45.901.096,00	45.901.096,00
9	Kab. Minahasa Utara	71.142.127,00	45.901.096,00	117.043.223,00
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	45.901.096,00	45.901.096,00
11	Kota Kotamobago	-	45.901.096,00	45.901.096,00
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	9.297.673,00	45.901.096,00	55.198.769,00
13	Kab. Minahasa Tenggara	8.157.648,00	45.901.096,00	54.058.744,00
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	45.901.096,00	45.901.096,00
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	45.901.096,00	45.901.096,00
	Prov. Sulawesi Utara	287.050.218,00	321.307.677,00	608.357.895,00
	<b>GORONTALO</b>	<b>303.290.198,00</b>	-	<b>303.290.198,00</b>
1	Kab. Boalemo	3.135.981,00	-	3.135.981,00
2	Kab. Gorontalo	31.615.731,00	-	31.615.731,00
3	Kota Gorontalo	-	-	-
4	Kab. Pohuwato	24.030.771,00	-	24.030.771,00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Kab. Bone Bolango	162.957.638,00	-	162.957.638,00
6	Kab. Gorontalo Utara	20.892.037,00	-	20.892.037,00
	Prov. Gorontalo	60.658.040,00	-	60.658.040,00
	<b>SULAWESI TENGAH</b>	<b>1.167.374.022,00</b>	<b>2.437.378.662,00</b>	<b>3.604.752.684,00</b>
1	Kab. Banggai	128.195.409,00	974.951.468,00	1.103.146.877,00
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	97.495.146,00	97.495.146,00
3	Kab. Buol	17.671.832,00	97.495.146,00	115.166.978,00
4	Kab. Toli-Toli	37.025.050,00	97.495.146,00	134.520.196,00
5	Kab. Donggala	43.189.315,00	97.495.146,00	140.684.461,00
6	Kab. Morowali	556.786.438,00	97.495.146,00	654.281.584,00
7	Kab. Poso	4.562.008,00	97.495.146,00	102.057.154,00
8	Kota Palu	48.405.355,00	97.495.146,00	145.900.501,00
9	Kab. Parigi Moutong	95.529.425,00	97.495.146,00	193.024.571,00
10	Kab. Tojo Una Una	2.534.385,00	97.495.146,00	100.029.531,00
11	Kab. Sigi	-	97.495.146,00	97.495.146,00
	Prov. Sulawesi Tengah	233.474.805,00	487.475.734,00	720.950.539,00
	<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>1.947.178.392,00</b>	<b>89.576.079.173,00</b>	<b>91.523.257.565,00</b>
1	Kab. Bantaeng	-	1.557.844.855,00	1.557.844.855,00
2	Kab. Barru	1.583.222,00	1.557.844.855,00	1.559.428.077,00
3	Kab. Bone	983.610,00	1.557.844.855,00	1.558.828.465,00
4	Kab. Bulukumba	-	1.557.844.855,00	1.557.844.855,00
5	Kab. Enrekang	29.460.717,00	1.557.844.855,00	1.587.305.572,00
6	Kab. G o w a	-	1.557.844.855,00	1.557.844.855,00
7	Kab. Jeneponto	5.740.766,00	1.557.844.855,00	1.563.585.621,00
8	Kab. Luwu	224.803.420,00	1.557.844.855,00	1.782.648.275,00
9	Kab. Luwu Utara	124.987.556,00	1.557.844.855,00	1.682.832.411,00
10	Kab. M a r o s	-	1.557.844.855,00	1.557.844.855,00
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	16.103.585,00	1.557.844.855,00	1.573.948.440,00
12*	Kab. Pinrang	-	1.557.844.855,00	1.557.844.855,00
13	Kab. Selayar	-	1.557.844.855,00	1.557.844.855,00
14	Kab. Sidenreng Rappang	80.042.411,00	1.557.844.855,00	1.637.887.266,00
15	Kab. Sinjai	6.493.402,00	1.557.844.855,00	1.564.338.257,00
16	Kab. Soppeng	-	1.557.844.855,00	1.557.844.855,00
17	Kab. Takalar	7.338.337,00	1.557.844.855,00	1.565.183.192,00
18	Kab. Tana Toraja	-	1.557.844.855,00	1.557.844.855,00
19	Kab. Wajo	5.600.863,00	1.557.844.855,00	1.563.445.718,00
20	Kota Pare-pare	-	1.557.844.855,00	1.557.844.855,00
21	Kota Makassar	-	1.557.844.855,00	1.557.844.855,00
22	Kota Palopo	2.367.474,00	1.557.844.855,00	1.560.212.329,00
23	Kab. Luwu Timur	1.052.237.350,00	35.830.431.672,00	36.882.669.022,00
24	Kab. Toraja Utara	-	1.557.844.855,00	1.557.844.855,00
	Prov. Sulawesi Selatan	389.435.679,00	17.915.215.836,00	18.304.651.515,00
	<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>25.519.850,00</b>	-	<b>25.519.850,00</b>
1	Kab. Majene	-	-	-
2	Kab. Mamuju	20.415.880,00	-	20.415.880,00
3	Kab. Polewali Mandar	-	-	-
4	Kab. Mamasa	-	-	-

*du*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Kab. Mamuju Utara	-	-	-
	Prov. Sulawesi Barat	5.103.970,00	-	5.103.970,00
	<b>SULAWESI TENGGARA</b>	<b>2.665.085.163,00</b>	<b>27.237.706.656,00</b>	<b>29.902.791.819,00</b>
1	Kab. Buton	195.518.843,00	2.541.521.217,00	2.737.040.060,00
2	Kab. Konawe	1.117.570.500,00	990.462.060,00	2.108.032.560,00
3	Kab. Kolaka	382.526.785,00	7.128.224.714,00	7.510.751.499,00
4	Kab. Muna	-	990.462.060,00	990.462.060,00
5	Kota Kendari	-	990.462.060,00	990.462.060,00
6	Kota Bau-bau	-	990.462.060,00	990.462.060,00
7	Kab. Konawe Selatan	160.360.076,00	990.462.060,00	1.150.822.136,00
8	Kab. Bombana	76.526.272,00	3.206.260.853,00	3.282.787.125,00
9	Kab. Wakatobi	-	990.462.060,00	990.462.060,00
10	Kab. Kolaka Utara	157.019.817,00	990.462.060,00	1.147.481.877,00
11	Kab. Konawe Utara	9.718.983,00	990.462.060,00	1.000.181.043,00
12	Kab. Buton Utara	32.826.854,00	990.462.060,00	1.023.288.914,00
	Prov. Sulawesi Tenggara	533.017.033,00	5.447.541.332,00	5.980.558.365,00
	<b>BALI</b>	-	-	-
1	Kab. Badung	-	-	-
2	Kab. Bangli	-	-	-
3	Kab. Buleleng	-	-	-
4	Kab. Gianyar	-	-	-
5	Kab. Jembrana	-	-	-
6	Kab. Karangasem	-	-	-
7	Kab. Klungkung	-	-	-
8	Kab. Tabanan	-	-	-
9	Kota Denpasar	-	-	-
	Bagian Provinsi	-	-	-
	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>2.409.483.094,00</b>	<b>73.116.765.575,00</b>	<b>75.525.248.669,00</b>
1	Kab. Bima	132.231.863,00	3.249.589.581,00	3.381.821.444,00
2	Kab. Dompu	90.111.472,00	3.249.589.581,00	3.339.701.053,00
3	Kab. Lombok Barat	2.175.987,00	3.249.589.581,00	3.251.765.568,00
4	Kab. Lombok Tengah	3.951.336,00	3.249.589.581,00	3.253.540.917,00
5	Kab. Lombok Timur	-	3.249.589.581,00	3.249.589.581,00
6	Kab. Sumbawa	728.941.655,00	3.249.589.581,00	3.978.531.236,00
7	Kota Mataram	-	3.249.589.581,00	3.249.589.581,00
8	Kota Bima	31.999.812,00	3.249.589.581,00	3.281.589.393,00
9	Kab. Sumbawa Barat	938.174.350,00	29.246.306.231,00	30.184.480.581,00
10	Kab. Lombok Utara	-	3.249.589.581,00	3.249.589.581,00
	Prov. Nusa Tenggara Barat	481.896.619,00	14.623.153.115,00	15.105.049.734,00
	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>44.928.135,00</b>	<b>272.369.437,00</b>	<b>317.297.572,00</b>
1	Kab. Alor	2.639.984,00	5.734.093,00	8.374.077,00
2	Kab. Belu	-	5.734.093,00	5.734.093,00
3	Kab. Ende	-	5.734.093,00	5.734.093,00
4	Kab. Flores Timur	-	5.734.093,00	5.734.093,00
5	Kab. Kupang	-	5.734.093,00	5.734.093,00
6	Kab. Lembata	-	5.734.093,00	5.734.093,00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Kab. Manggarai	27.137.761,00	108.947.780,00	136.085.541,00
8	Kab. Ngada	-	5.734.093,00	5.734.093,00
9	Kab. Sikka	-	5.734.093,00	5.734.093,00
10	Kab. Sumba Barat	-	5.734.093,00	5.734.093,00
11	Kab. Sumba Timur	-	5.734.093,00	5.734.093,00
12	Kab. Timor Tengah Selatan	3.007.982,00	5.734.093,00	8.742.075,00
13	Kab. Timor Tengah Utara	-	5.734.093,00	5.734.093,00
14	Kota Kupang	-	5.734.093,00	5.734.093,00
15	Kab. Rote Ndao	-	5.734.093,00	5.734.093,00
16	Kab. Manggarai Barat	3.156.781,00	5.734.093,00	8.890.874,00
17	Kab. Nagekeo	-	5.734.093,00	5.734.093,00
18	Kab. Sumba Barat Daya	-	5.734.093,00	5.734.093,00
19	Kab. Sumba Tengah	-	5.734.093,00	5.734.093,00
20	Kab. Manggarai Timur	-	5.734.093,00	5.734.093,00
	Prov. Nusa Tenggara Timur	8.985.627,00	54.473.890,00	63.459.517,00
	<b>MALUKU</b>	<b>9.929.740,00</b>	-	<b>9.929.740,00</b>
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	2.104.947,00	-	2.104.947,00
2	Kab. Maluku Tengah	2.798.863,00	-	2.798.863,00
3	Kab. Maluku Tenggara	3.039.982,00	-	3.039.982,00
4	Kab. Pulau Buru	-	-	-
5	Kota Ambon	-	-	-
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	-
8	Kab. Kepulauan Aru	-	-	-
9	Kota Tual	-	-	-
10	Kab. Maluku Barat Daya	-	-	-
11	Kab. Buru Selatan	-	-	-
	Prov. Maluku	1.985.948,00	-	1.985.948,00
	<b>MALUKU UTARA</b>	<b>2.123.016.455,00</b>	<b>170.313.163.834,00</b>	<b>172.436.180.089,00</b>
1	Kab. Halmahera Tengah	306.505.118,00	12.030.280.676,00	12.336.785.794,00
2	Kab. Halmahera Barat	3.159.021,00	9.732.180.779,00	9.735.339.800,00
3	Kota Ternate	-	9.732.180.779,00	9.732.180.779,00
4	Kab. Halmahera Timur	685.015.320,00	58.951.287.505,00	59.636.302.825,00
5	Kota Tidore Kepulauan	-	9.732.180.779,00	9.732.180.779,00
6	Kab. Kepulauan Sula	20.479.880,00	9.732.180.779,00	9.752.660.659,00
7	Kab. Halmahera Selatan	86.899.299,00	10.567.853.481,00	10.654.752.780,00
8	Kab. Halmahera Utara	596.354.526,00	15.772.386.129,00	16.368.740.655,00
	Bagian Provinsi	424.603.291,00	34.062.632.727,00	34.487.236.018,00
	<b>PAPUA</b>	<b>3.836.249.629,00</b>	<b>1.373.281.588.791,00</b>	<b>1.377.117.838.420,00</b>
1	Kab. Biak Numfor	-	21.127.409.058,00	21.127.409.058,00
2	Kab. Jayapura	50.276.345,00	21.127.409.058,00	21.177.685.403,00
3	Kab. Jayawijaya	108.569.284,00	21.127.409.058,00	21.235.978.342,00
4	Kab. Merauke	-	21.127.409.058,00	21.127.409.058,00
5	Kab. Mimika	591.595.418,00	549.312.635.522,00	549.904.230.940,00
6	Kab. Nabire	541.185.313,00	21.127.409.058,00	21.668.594.371,00
7	Kab. Paniai	547.916.026,00	21.127.409.058,00	21.675.325.084,00
8	Kab. Puncak Jaya	100.150.774,00	21.127.409.058,00	21.227.559.832,00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Landrent	Royalty	Jumlah DBH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Kab. Yapen Waropen	7.995.153,00	21.127.409.058,00	21.135.404.211,00
10	Kota Jayapura	-	21.127.409.058,00	21.127.409.058,00
11	Kab. Sarmi	522.822.733,00	21.127.409.058,00	21.650.231.791,00
12	Kab. Keerom	299.675.046,00	21.127.409.058,00	21.427.084.104,00
13	Kab. Yahukimo	-	21.127.409.058,00	21.127.409.058,00
14	Kab. Pegunungan Bintang	90.991.467,00	21.127.409.058,00	21.218.400.525,00
15	Kab. Tolikara	131.659.389,00	21.127.409.058,00	21.259.068.447,00
16	Kab. Boven Digoel	-	21.127.409.058,00	21.127.409.058,00
17	Kab. Mappi	-	21.127.409.058,00	21.127.409.058,00
18	Kab. Asmat	-	21.127.409.058,00	21.127.409.058,00
19	Kab. Waropen	76.162.754,00	21.127.409.058,00	21.203.571.812,00
20	Kab. Supiori	-	21.127.409.058,00	21.127.409.058,00
21	Kab. Mamberamo Raya	-	21.127.409.058,00	21.127.409.058,00
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	21.127.409.058,00	21.127.409.058,00
23	Kab. Yalimo	-	21.127.409.058,00	21.127.409.058,00
24	Kab. Lanny Jaya	-	21.127.409.058,00	21.127.409.058,00
25	Kab. Nduga	-	21.127.409.058,00	21.127.409.058,00
26	Kab. Puncak	-	21.127.409.058,00	21.127.409.058,00
27	Kab. Dogiyai	-	21.127.409.058,00	21.127.409.058,00
	Prov. Papua	767.249.927,00	274.656.317.761,00	275.423.567.688,00
	<b>PAPUA BARAT</b>	<b>357.685.266,00</b>	<b>6.093.207.840,00</b>	<b>6.450.893.106,00</b>
1	Kab. Sorong	-	304.660.392,00	304.660.392,00
2	Kab. Manokwari	-	304.660.392,00	304.660.392,00
3	Kab. Fak Fak	-	304.660.392,00	304.660.392,00
4	Kota Sorong	-	304.660.392,00	304.660.392,00
5	Kab. Sorong Selatan	-	304.660.392,00	304.660.392,00
6	Kab. Raja Ampat	70.024.678,00	2.437.283.136,00	2.507.307.814,00
7	Kab. Teluk Bintuni	-	304.660.392,00	304.660.392,00
8	Kab. Teluk Wondama	-	304.660.392,00	304.660.392,00
9	Kab. Kaimana	216.123.535,00	304.660.392,00	520.783.927,00
	Prov. Papua Barat	71.537.053,00	1.218.641.568,00	1.290.178.621,00
	<b>TOTAL NASIONAL</b>	<b>67.545.999.879,00</b>	<b>6.911.214.999.798,00</b>	<b>6.978.760.999.677,00</b>

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U. D

Antonius Suharto  
NIP 060041107

